

BAB V KESIMPULAN

5.1 Temuan Studi

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya yang merupakan rangkuman dari hasil wawancara, observasi lapangan, pengolahan data sekunder dan arsip-arsip terkait, maka dapat dirumuskan beberapa temuan studi sebagai rangkuman dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil temuan studi ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam perumusan rekomendasi terkait dengan pelayanan sarana pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen. Adapun beberapa temuan yang dapat dirumuskan dalam penelitian mengenai pelayanan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen akan dijabarkan pada poin-poin di bawah ini.

5.1.1 Pelayanan sarana pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen tergolong baik, namun belum optimal

Berdasarkan pada analisis bentuk pelayanan lintas batas SMP N 3 Mranggen dapat disimpulkan bahwa dari sisi kualitas pelayanan pendidikan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung pendidikan, SMP N 3 Mranggen mampu memberikan pelayanan yang baik. Dukungan fasilitas yang lengkap seperti tersedianya ruang elajar yang nyaman, ruang laboratorium bahasa, ruang multimedia, ruang kesenian dan ruang penunjang lainnya dan adanya standar kurikulum pengajaran yang berstandar internasional (RSBI) menjadikan sekolah ini dinilai memiliki kualitas pelayanan yang baik. Namun demikian, pelayanan ini dirasa belum optimal karena belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan adanya persoalan aksesibilitas yang belum optimal. Saat ini, mayoritas pengguna pelayanan pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen secara relatif dapat dikategorikan ke dalam kategori masyarakat berpenghasilan menengah dan menengah ke atas. Fakta bahwa 66,08% dari orang tua/wali siswa memiliki penghasilan Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000/bulan menunjukkan bahwa SMPN 3 Mranggen, sebagai salah satu Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan menengah. Hanya sekitar 5,43% dari orang tua/wali siswa yang memiliki penghasilan antara Rp 500.000,- s.d. Rp 1.000.000,- dan kurang dari Rp 500.000,-. Meskipun ada program beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, namun hal ini dirasa belum optimal. Hal ini didukung oleh pernyataan beberapa narasumber yang mengharapkan biaya pendidikan dapat lebih rendah.

Hal lain yang menyebabkan pelayanan SMP N 3 Mranggen yang belum optimal adalah terkait dengan aksesibilitas. Kondisi aksesibilitas menuju ke SMP N 3 Mranggen saat ini dinilai belum optimal karena beberapa hal seperti kondisi jalan yang buruk, sarana angkutan umum yang

belum menjangkau hingga depan SMP 3 Mranggen sehingga diperlukan 2 kali pergantian moda, serta kondisi jalan yang padat pada pagi hari sehingga membahayakan bagi siswa. Diperlukan adanya peningkatan aksesibilitas, khususnya penyediaan moda transportasi lintas batas yang aman, nyaman khususnya bagi para siswa.

5.1.2 Tidak ada hubungan kerjasama formal antara Kabupaten Demak dan Kota Semarang dalam penyediaan pelayanan pendidikan lintas batas daerah

Berdasarkan pada analisis mekanisme pelayanan sarana pendidikan lintas batas daerah SMPN 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang ditemukan bahwa pada dasarnya belum ada kebijakan atau aturan yang mengatur hubungan kerjasama antar dua daerah. Masing-masing daerah memiliki kewenangan masing-masing dan mengatur daerahnya masing-masing. Kewenangan di kawasan perbatasan menjadi tanggungjawab daerah dimana fasilitas berada. Dalam hal ini, kewenangan dalam pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas perbatasan SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Semarang-Demak, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Demak.

Dalam hal ini, baik Pemerintah Pusat menjalankan fungsi sebagai penentu kebijakan formal yang bersifat general, terutama sebagai penentu kebijakan utama dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan pendidikan, yang kemudian di daerah kewenangannya diperpanjang dengan adanya Dinas Pendidikan Provinsi. Namun demikian, kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini hanya terbatas pada penetapan regulasi pokok terkait dengan pelaksanaan penyediaan pendidikan di daerah seperti tata cara penyelenggaraan pendidikan, profesionalitas guru dan karyawan, kebijakan kurikulum pendidikan, standar pelayanan minimal untuk pelayanan pendidikan, dan pengalokasian dana untuk mendukung pengembangan pendidikan.

Sementara itu, kewenangan pengaturan pelayanan pendidikan di daerah menjadi kewenangan masing-masing daerah. Dalam hal ini, tidak ada kerjasama yang dilakukan oleh Kabupaten Demak dan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan lintas batas daerah. Meskipun sebagian siswa berasal dari Semarang, namun dari sisi kebijakan, tidak ada kebijakan yang mengatur mengenai kuota daerah asal siswa ataupun kerjasama lain dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan lintas batas.

5.1.3 Pelayanan sarana pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen murni dipengaruhi oleh mekanisme pasar dalam pelayanan sarana pendidikan

Berdasarkan pada analisis hal yang menyebabkan pelayanan lintas batas SMP N 3 Mranggen, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemilihan SMP N 3 Mranggen sebagai sarana pendidikan murni dipengaruhi oleh mekanisme pasar dalam pelayanan pendidikan yaitu jarak yang

dekat, biaya yang cukup terjangkau dan kualitas sekolah. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang paling dominan dalam pemilihan SMP N 3 Mranggen sebagai sarana pendidikan lintas batas. Dalam hal ini, faktor jarak pada umumnya menjadi pertimbangan utama pemilihan SMP N 3 Mranggen dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Meskipun sebagian narasumber tinggal dalam wilayah administratif Kota Semarang, namun pemilihan sekolah tetap mempertimbangkan jarak antara sekolah dan lokasi tempat tinggal, bukan hanya masalah administrasi wilayah. Dalam hal ini, SMP N 3 Mranggen memiliki jarak yang relatif dekat dengan permukiman-permukiman yang terletak di perbatasan Kota Semarang, sedangkan sekolah-sekolah di Semarang yang memiliki standar pelayanan yang setaraf lokasinya relatif jauh dari kawasan permukiman tersebut. Kedekatan jarak tersebut kemudian menjadi pertimbangan dalam pemilihan SMP 3 Mranggen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan.

Selain itu, faktor jarak dan kualitas sekolah juga menjadi hal yang mempengaruhi pemilihan SMP N 3 Mranggen dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan. Dalam hal ini biaya yang terjangkau dilihat secara relatif dengan membandingkan dengan sekolah yang lain di sekitar Mranggen dan dengan kualitas yang disediakan oleh SMP N 3 Mranggen. Dengan standar kualitas RSBI, biaya SPP bulanan sebesar Rp 150.000,- untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas, dan Rp 100.000,- untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, dirasa sepadan oleh para pengguna, meskipun masih ada beberapa responden yang masih mengharapkan biaya pendidikan yang lebih rendah.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan sarana pendidikan lintas batas di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang tidak disebabkan adanya kerjasama antar daerah yang bersifat formal, melainkan murni dipengaruhi oleh mekanisme pasar dalam pelayanan sarana pendidikan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan mekanisme pasar dalam penyediaan pelayanan sarana pendidikan adalah terkait dengan kualitas sekolah, hal aksesibilitas atau kemudahan akses dalam menjangkau fasilitas pendidikan, dan hal keterjangkauan biaya dalam mengakses sarana pendidikan. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa pelayanan SMP N 3 Mranggen sebagai sarana pendidikan lintas batas tergolong baik yang ditunjukkan proporsi siswa yang belajar di SMP N 3 Mranggen. Fakta bahwa sebagian siswa berasal dari kota Semarang menunjukkan bahwa SMP N 3 Mranggen telah menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan lintas batas dengan baik. Namun demikian, pelayanan ini dirasa belum optimal karena adanya kekurangan di beberapa pelayanan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan adanya persoalan aksesibilitas yang belum optimal. Oleh karena itu, masih

diperlukan adanya perbaikan di beberapa hal untuk meningkatkan pelayanan SMP N 3 Mranggen sebagai sarana pendidikan lintas batas.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan pada temuan studi dan kesimpulan yang telah dirumuskan, dapat disimpulkan secara garis besar dalam penelitian ini bahwa pelayanan sarana pendidikan lintas batas di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang tidak disebabkan adanya kerjasama antar daerah yang bersifat formal, melainkan murni dipengaruhi oleh mekanisme pasar dalam pelayanan sarana pendidikan. Hal ini bukanlah sesuatu yang dinilai menguntungkan atau merugikan beberapa pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan lintas batas, namun demikian hal ini dapat dipandang sebagai hal yang menyebabkan pelayanan pendidikan lintas batas kurang optimal. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, dibutuhkan beberapa rekomendasi yang bersifat komprehensif untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan, yaitu sebagai berikut:

- Diperlukan adanya peningkatan pelayanan SMP N 3 Mranggen untuk meningkatkan fungsinya sebagai sarana pendidikan lintas batas daerah seperti peningkatan aksesibilitas melalui:
 - a) Penjalinan kerjasama dengan pihak tertentu terkait dengan peningkatan penyediaan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu.
 - b) Perbaikan jalan menuju ke lokasi SMP N 3 Mranggen.
 - c) Penambahan moda transportasi lintas batas sehingga meningkatkan aksesibilitas.
 - d) Penjaminan keamanan melalui penyediaan moda transportasi yang aman bagi siswa dan penyediaan jalur sepeda ke arah SMP untuk meningkatkan aspek keamanan.
- Peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan lintas. Kerjasama ini dapat dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan lintas batas sebagaimana disebutkan di atas, seperti dalam perbaikan jaringan jalan yang menghubungkan kedua daerah dan penambahan moda transportasi lintas batas untuk menunjang peningkatan pelayanan.